

SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Debrina Natalia*, Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M. , Dr. Elly Hernawati, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: debrina.789@gmail.com

***Abstract** - Children often become the victims of criminal acts committed by adults, one of which is the crime of sexual violence. The crime of sexual violence has increased over the year in Indonesia. The government issued the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 which enforces the Chemical Castration Act as an aggravation of punishment for the perpetrators of sexual violence against children. This is because the criminal sanctions that apply in the Criminal Code and the Child Protection Act are deemed less effective. One example was in the Mojokerto District Court Decision Number 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk where MA committed sexual violence to 9 children, one of which was Bunga. This study discussed the application of chemical castration sanction in view of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 70 of 2020 concerning Procedures for the Implementation of Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children. This study included the time-period set for the implementation of the chemical castration, the steps required before the castration Chemical castration is carried out, and the competent authorities who carry out the chemical castration action.*

***Keywords:** Sexual Violence, Children, Chemical Castration Sanction.*

Abstrak – Dewasa ini anak sering menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual mengalami peningkatan tiap tahunnya di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang memberlakukan Tindakan Kebiri Kimia sebagai pemberat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Hal ini dikarenakan hukuman pidana yang berlaku dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dirasa kurang efektif. Salah satu contohnya yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dimana MA melakukan kekerasan seksual yang terjadi pada 9 anak, salah satunya adalah Bunga. Di dalam penelitian ini dibahas mengenai penerapan sanksi tindakan kebir kimia ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, baik itu jangka waktu yang diatur untuk pelaksanaan tindakan kebir kimia tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum tindakan kebir kimia dilakukan sampai pihak-pihak yang berwenang melakukan eksekusi tindakan kebir kimia tersebut.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak, Sanksi Kebiri Kimia.